

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap integritas politik Gibran Rakabuming pada Pemilu 2024 pasca isu Fufufafa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap integritas politik Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 pasca isu Fufufafa secara keseluruhan berada pada kategori sangat negatif, dengan nilai mean keseluruhan sebesar 1,6398. Sebanyak 79 responden (69,3%) dari 114 responden yang diteliti memiliki persepsi sangat negatif, dan 25 responden (21,9%) memiliki persepsi negatif, sehingga total 91,2% responden menunjukkan penilaian negatif terhadap integritas politik Gibran Rakabuming. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap integritas politik Gibran Rakabuming pasca isu Fufufafa adalah negatif terbukti dan dapat diterima.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa isu yang berkembang di ruang digital memiliki peran dalam membentuk cara masyarakat memberikan penilaian terhadap seorang tokoh politik. Meskipun penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan sebab akibat, hasil analisis deskriptif memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa responden memberikan penilaian yang lebih negatif terhadap aspek integritas politik setelah mereka mengetahui dan mengikuti perkembangan isu Fufufafa. Hal tersebut terlihat dari konsistensi jawaban responden pada berbagai indikator yang berkaitan dengan kejujuran, konsistensi, akuntabilitas, serta etika politik.

Kedua, dari seluruh dimensi yang diukur, dimensi Transparansi (mean = 1,515) dan Akuntabilitas (mean = 1,520) menunjukkan nilai persepsi paling negatif, dengan item mengenai ketiadaan tanggung jawab publik Gibran Rakabuming (item 29) mencatat nilai mean terendah dari keseluruhan 30 item pernyataan (1,47). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat menilai Gibran Rakabuming kurang transparan dan kurang

akuntabel dalam merespons isu Fufufafa yang berkembang di ruang publik, di mana ketiadaan klarifikasi resmi yang dianggap memadai dinilai sebagai bentuk kurangnya tanggung jawab kepada publik.

Ketiga, dimensi Situasi (The Situation) memiliki nilai mean tertinggi di antara dimensi-dimensi lainnya (mean = 1,710) namun tetap berada pada kategori sangat negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa konteks situasional kemunculan isu Fufufafa, yaitu menjelang dan setelah Pemilu 2024, serta pengaruh lingkungan sosial, turut berkontribusi dalam membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap integritas politik Gibran Rakabuming, meskipun kontribusinya relatif lebih moderat dibandingkan dimensi-dimensi yang berkaitan langsung dengan substansi integritas.

Keempat, hasil analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa persepsi negatif dalam penelitian ini bersifat konsisten dan homogen, tercermin dari sempitnya rentang nilai mean antar-item (1,47–1,80) serta rendahnya standar deviasi total (0,63688). Pola ini mengindikasikan bahwa penolakan terhadap integritas politik Gibran Rakabuming bukan sekadar opini kelompok kecil yang ekstrem, melainkan pandangan yang secara luas dibagikan oleh mayoritas responden, bahkan cenderung menembus batas-batas polarisasi partisan yang umumnya mewarnai persepsi politik di Indonesia.

Kelima, dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa, penelitian ini memberikan kebaruan melalui penggabungan kajian viralitas isu Fufufafa dengan pengukuran integritas politik secara multidimensional (transparansi, konsistensi, kewenangan/etika politik, dan akuntabilitas) dalam satu kerangka penelitian kuantitatif yang terintegrasi sebuah pendekatan yang belum banyak ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada citra politik, opini publik secara umum, atau analisis konten media semata.

Keenam, karakteristik responden yang didominasi oleh kelompok usia muda (17–25 tahun) sebanyak 78,9% dan berlatar domisili Jakarta Timur (42,1%) mencerminkan bahwa kelompok pemilih muda yang aktif di

media sosial memiliki kepekaan tinggi terhadap isu-isu viral yang berkaitan dengan integritas tokoh politik. Temuan ini menegaskan peran media sosial sebagai arena utama pembentukan persepsi politik di era digital, sekaligus menggarisbawahi bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan sekaligus paling aktif dalam merespons dinamika informasi politik yang berkembang secara viral.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran praktis yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Bagi aktor politik dan pejabat publik, penelitian ini menunjukkan bahwa kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam merespons isu yang berkembang di media sosial sangat menentukan persepsi publik terhadap integritas politik seseorang. Nilai mean terendah pada item terkait akuntabilitas (1,47) menjadi indikasi kuat bahwa publik menuntut lebih dari sekadar pernyataan penolakan singkat terhadap suatu tuduhan; publik menginginkan klarifikasi yang detail, terbuka, dan disertai bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu, para aktor politik disarankan untuk lebih proaktif memberikan klarifikasi yang jelas dan berbasis fakta ketika menghadapi isu viral yang berkaitan dengan dirinya, agar tidak menimbulkan kekosongan informasi yang dapat diisi oleh spekulasi dan interpretasi negatif publik.

Bagi tim komunikasi politik dan konsultan kampanye, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang strategi komunikasi krisis yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika opini publik di era media sosial. Mengingat temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi negatif dapat terbentuk secara cepat, meluas, dan cenderung homogen lintas kelompok masyarakat, pengelolaan reputasi digital harus menjadi bagian integral dari strategi politik sejak awal, bukan sekadar respons reaktif setelah isu viral.

Jejak digital yang bersifat laten, sebagaimana terbukti dalam kasus Fufufafa, dapat kapan saja diangkat kembali dan berdampak signifikan terhadap persepsi publik, sehingga audit dan mitigasi risiko jejak digital idealnya dilakukan secara berkala oleh tim pendukung figur publik.

Bagi partai politik dan koalisi pengusung, temuan bahwa persepsi negatif terbentuk secara merata di seluruh dimensi integritas bukan hanya pada aspek tertentu mengindikasikan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak digital kandidat sejak tahap awal pencalonan, bukan hanya berfokus pada rekam jejak formal seperti riwayat pendidikan atau karier politik.

Bagi penyelenggara dan pengawas pemilu (KPU dan Bawaslu), penelitian ini dapat menjadi masukan mengenai pentingnya mendorong transparansi digital calon peserta pemilu, mengingat isu-isu berbasis jejak digital semakin menjadi faktor determinan dalam pembentukan persepsi elektoral masyarakat, khususnya di kalangan pemilih muda yang mendominasi struktur pemilih Indonesia saat ini.

Bagi masyarakat sebagai pemilih, penelitian ini mengajak untuk lebih kritis dan selektif dalam menerima serta memaknai informasi politik yang beredar di media sosial. Mengingat temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi dapat terbentuk secara kuat bahkan tanpa pembuktian hukum yang final, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan literasi digital agar tidak mudah terbawa arus narasi yang belum terverifikasi secara faktual, sehingga dapat membentuk persepsi yang lebih berimbang, objektif, dan berbasis bukti terhadap tokoh politik

5.2.2 Saran Teoritis

Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan studi selanjutnya.

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel dengan menjangkau berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial-ekonomi yang lebih beragam, sehingga hasil

penelitian dapat lebih representatif terhadap keseluruhan masyarakat DKI Jakarta. Penelitian ini didominasi oleh kelompok usia muda yang aktif di media sosial, sehingga perspektif kelompok usia yang lebih tua perlu dipertimbangkan dalam studi berikutnya.

Kedua, penelitian mendatang dapat mengembangkan variabel penelitian dengan menambahkan variabel mediasi atau moderasi, seperti tingkat literasi digital, frekuensi penggunaan media sosial, atau afiliasi politik responden. Penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi masyarakat terhadap integritas politik di era digital, sekaligus menjelaskan lebih jauh mengapa terdapat kelompok kecil responden yang tetap mempertahankan persepsi positif di tengah dominasi persepsi negatif.

Ketiga, penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan satu titik waktu pengukuran (*cross-sectional*). Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan persepsi masyarakat dari waktu ke waktu, atau menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap integritas politik seorang tokoh publik.

Keempat, mengingat penelitian ini menemukan bahwa dimensi Akuntabilitas dan Transparansi menjadi titik paling kritis dalam pembentukan persepsi negatif, penelitian selanjutnya dapat mendalami secara khusus kedua dimensi tersebut melalui pendekatan kualitatif, misalnya melalui wawancara mendalam untuk memahami secara lebih rinci bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang sesungguhnya diharapkan publik dari seorang tokoh politik ketika menghadapi isu viral serupa.

Kelima, penelitian mendatang juga dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan persepsi masyarakat terhadap

integritas politik beberapa tokoh sekaligus yang menghadapi isu viral serupa, sehingga dapat diperoleh gambaran komparatif mengenai pola respons publik terhadap berbagai tipe isu integritas politik, guna memperkaya kerangka teori integritas politik dalam konteks komunikasi politik digital di Indonesia